



Dugaan Korupsi Jembatan Lemukih Buleleng Saksi Ahli dan Kuasa Hukum Debat Soal Kerugian Negara

DENPASAR, NusaBali

Saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Buleleng di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (18/11). Dalam sidang, kuasa hukum kedua terdakwa sempat terlibat beberapa kali perdebatan sengit dengan saksi ahli BPKP ini.

Saksi BPKP yang dihadirkan kali ini, yaitu Winarko yang memberikan keterangan untuk kedua terdakwa masing-masing Wayan Wenten yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Hj Arisya Agustina yang merupakan rekanan proyek. Dihadapan majelis hakim, saksi ahli mengatakan dari hasil pemeriksaan dalam pembangunan jembatan Lemukih ini ditemukan kerugian negara Rp 699 juta.

Angka kerugian negara ini didapat dari selisih pengeluaran uang

Negara dengan realisasi pengerjaan. Dijelaskannya, di lapangan realisasi proyek jembatan ini hanya 22,89 persen. Namun dalam laporan disebutkan realisasi pengerjaan mencapai 45 persen. "Uang negara yang keluar Rp 1,3 miliar yang merupakan uang muka dan pembayaran termin pertama setelah penyelesaian 45 persen. Tapi realisasi di pengerjaan proyek hanya 22,89 persen. Dari sinilah kami temukan kerugian negara Rp 699 juta," jelasnya.

Meski dengan gamblang menjelaskan soal kerugian Negara, namun saksi tidak bisa menjelaskan aliran dana ini. "Kami hanya tahu uang tersebut mengalir ke rekening rekanan. Selanjutnya ke mana saja uang itu kami tidak tahu," bebarnya.

Sidang mulai memanas saat kuasa hukum Aristya, Raja Nasution diberikan kesempatan bertanya. Ia sempat menanyakan terkait cara perhitungan kerugian negara oleh BPKP yang tidak menghitung biaya

operasional rekanan seperti gaji pegawai, biaya transportasi dan lainnya. Namun saksi ahli BPKP ini hanya menjawab enteng. "Itu di luar kewenangan kami. Karena kami hanya menghitung kerugian negara saja," ujar saksi ahli. Terdakwa Wenten yang didampingi kuasa hukumnya, Made Suardika juga berdebat sengit dengan saksi ahli.

Saat itu, Suardika menanyakan soal material di lokasi proyek yang tidak dihitung oleh saksi ahli. Padahal menurut kuasa hukum terdakwa, jika material tersebut dihitung, maka realisasi pengerjaan sudah masuk 45 persen. "Tapi kenapa anda tidak menghitung juga material yang ada di proyek," tanya Suardika yang kembali ditanggapi enteng oleh saksi ahli. "Kami tidak tahu soal material di proyek tersebut karena tidak turun ke lokasi. Kami hanya melakukan pemeriksaan sesuai laporan yang sudah dibuat Dinas PU," pungkas saksi ahli ini. rez

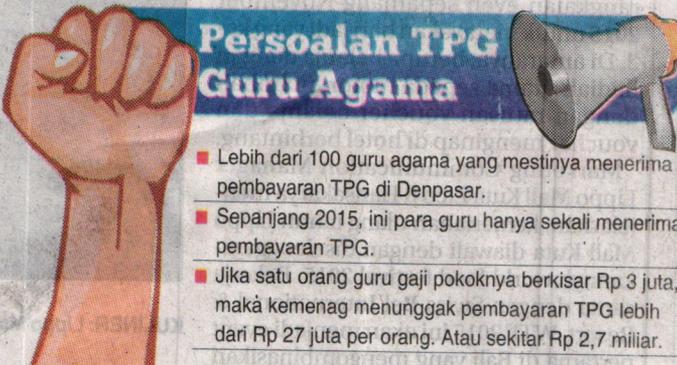
Edisi : Jumtk, 20 November 2015

Hal : 5



Guru Agama

Ancam Demo



Persoalan TPG Guru Agama

- Lebih dari 100 guru agama yang mestinya menerima pembayaran TPG di Denpasar.
- Sepanjang 2015, ini para guru hanya sekali menerima pembayaran TPG.
- Jika satu orang guru gaji pokoknya berkisar Rp 3 juta, maka kemenag menunggak pembayaran TPG lebih dari Rp 27 juta per orang. Atau sekitar Rp 2,7 miliar.

Dana TPG Hampir Setahun Tak Dibayar

DENPASAR - Pencairan dana tunjangan profesi guru (TPG) di beberapa daerah kerap bermasalah. Kali ini terjadi di Denpasar. Guru-guru agama se-Denpasar, khususnya guru agama Islam *pakrimik* alias *ngedumel* lantaran TPG hampir

setahun ini tidak cair. Tepatnya sembilan bulan. Karena kecewa, mereka pun mengancam demo.

Selama ini, guru-guru yang sudah melakukan sertifikasi berhak memperoleh TPG sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan. Pencairannya sendiri biasanya dilakukan setiap triwulan atau tiga bulan sekali. Gusar akan masalah ini, para guru sampai

mengancam bakal unjuk rasa bila tak kunjung ada kejelasan.

Beberapa orang guru yang ditemui kemarin (19/11), mengaku tidak biasanya TPG pembayarannya terlambat lama. "Kami selama tahun 2015 ini baru sekali menerima TPG. Biasanya lancar setiap triwulan," ujar guru berinisial NA yang mengajar di salah satu SD itu ■

► Baca **Guru...** Hal 31

Edisi : Jum'at, 20 November 2015

Hal : 21



Takut Dananya Masuk Silpa

■ GURU...

Sambungan dari hal 21

Dia menjelaskan, para guru agama Islam terakhir menerima dana TPG pada Juni lalu. "Itu pun hanya untuk tiga bulan, periode Januari - Maret. Sisanya belum sampai sekarang," imbuh guru yang wanti-wanti namanya tak dituliskan lengkap itu.

Anehnya, jelas ITN, guru lainnya, pembayaran TPG yang *ngadat* ini hanya terjadi pada guru agama Islam saja. Pasalnya, menurut informasi yang diperoleh, guru-guru agama lain dan guru-guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) pembayaran TPG tak ada masalah. "Ini

lah yang jadi pertanyaan, apa memang tidak diurus atau bagaimana," keluh dia. "Dari informasi yang kami peroleh, sebenarnya dana dari pusat itu sudah cair. Kenapa di sini malah macet," tambah dia.

Dijelaskan, untuk proses pencairan TPG, guru-guru wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain, menyeter

surat keterangan mulai tugas dan absensi yang menerangkan bahwa sudah memenuhi jam mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu, serta beberapa persyaratan lain. Untuk pengajuannya sendiri dilakukan oleh Kemenag kota/kabupaten melalui Seksi Pendidikan Agama masing-masing.

Lebih jauh, ITN memapar-

kan, sejatinya para guru juga tidak tinggal diam. Beberapa waktu lalu, dalam forum rapat Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI), Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Agama Islam (Pendais) Kantor Kemenag Kota Denpasar Ninik Surani diundang dengan harapan bisa memberikan keterangan kenapa pencairan TPG lambat. "Tapi, yang bersangkutan tidak datang," ujarnya.

Selain itu, di antara guru-guru juga ada yang pernah menanyakan langsung kepada Ninik. Namun, menurut ITN, jawaban yang diperoleh tidak memuaskan. "Jawabannya terdengar ketus," ungkap dia lagi. Diketahui, guru-guru agama Islam yang belum mendapat pembayaran TPG lebih dari 100 orang. Asumsinya, jika satu orang guru gaji pokoknya berkisar Rp 3 juta, maka kemenag menunggak pembayaran TPG lebih dari Rp 27 juta per orang.

Lanjut ITN, guru-guru yang

tergabung dalam KKG berencana kembali mengundang Ninik dalam rapat. "Jika tetap tidak ada kejelasan, kami sudah berdiskusi dan berencana melakukan demonstrasi. Kami khawatir, ini sudah menjelang akhir tahun. Bisa-bisa dana tersebut masuk Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran)," tandasnya.

Kasi Pendais Kantor Kemenag Kota Denpasar Ninik Surani yang ditemui di kantornya kemarin enggan menanggapi keluhan guru-guru tersebut.

Dia beralasan tidak punya kewenangan untuk memberikan keterangan dan meminta koran ini langsung menghubungi Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar Komang Sri Marheni. Ditanya apakah keluhan guru-guru itu benar, dia hanya menjawab diplomatis. "Yang jelas, kami bekerja sudah sesuai prosedur. Percaya *lah* kami tidak macam-macam," ujar Ninik.

Lantas, apa penyebabnya, pembayaran TPG nunggak hingga

sembilan bulan? Ditanya begitu, lagi-lagi Ninik enggan berkomentar. "Biar nanti saja Ibu Kepala menjelaskan. Biar saya tidak melangkahi," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar Komang Sri Marheni kemarin mengaku sedang berada di Jakarta. Anehnya, melalui sekretarisnya, Marheni menyampaikan bahwa pihaknya mempersilakan Ninik untuk memberi keterangan. Namun, ketika ditemui kembali, lagi-lagi Ninik tutup mulut. "Nanti, sabar *ya*, tunggu Ibu Kepala," kata dia.

Sementara itu, berdasar informasi yang diperoleh dari salah seorang pegawai Kantor Kemenag Kota Denpasar, disebutkan bahwa memang benar TPG guru agama Islam untuk sembilan bulan belum dibayar. Dia beralasan dananya memang belum cair. "Dananya belum ada, apa yang mau dibayar," ujar pegawai yang namanya tak mau dikorbankan itu. (aim/yes)



Polda Tutup Kasus Dugaan Korupsi PD Swantantra

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali menutup penyelidikan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal di Perusahaan Daerah (PD) Swantantra, Buleleng. Penghentian ini dilakukan karena tidak ditemukan adanya tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2013 tersebut.

Penghentian penyelidikan ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan, Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/161/IX/2015/Ditreskrimsus yang ditandatangani Wadir Reskrimsus Polda Bali, AKBP T Widodo Rahino pada 29 September lalu. Dalam SP2HP tersebut dijelaskan hasil penyelidikan dugaan korupsi penyertaan modal pada PD Swantantra sebesar Rp 1,2 miliar dari APBD Buleleng tahun 2013 yang semula untuk perkebunan dan peternakan yang dialihkan menjadi usaha sewa kendaraan yang disewa oleh Pemkab Buleleng tidak ditemukan fakta hukum adanya kerugian Negara.

Sehingga dengan demikian sesuai hasil penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi kegiatan tersebut belum dapat dibuktikan. Namun dalam butir ketiga SP2HP tersebut diberi catatan jika di kemudian hari ditemukan alat bukti baru (novum) yang mengarah pada pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, penyelidikan bisa dibuka kembali.

Penghentian penyelidikan kasus ini juga dibenarkan Dirut PD Swantantra, Ketut Siwa pada, Kamis (19/11). Ia mengatakan sudah menerima SP2HP dari Polda Bali yang intinya menutup penyelidikan dugaan korupsi dalam penyertaan modal di perusahaan daerah yang dipimpinnya. "Ya. SP2HP dari Polda sudah saya terima," ujarnya saat ditemui di Denpasar.

Dijelaskannya, PD Swantantra adalah perusahaan daerah murni milik Pemkab Buleleng. Terkait penyertaan modal Rp 1,2 miliar dari Pemkab Buleleng juga dibenarkannya. Selain itu PD Swantantra juga meminjam Rp 10 miliar di BPD Bali untuk pengadaan 62 unit mobil yang disewakan ke Pemkab Buleleng. rez

Edisi : Jum'at, 20 November 2015

Hal : 5